

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANITA DYAH WULANDARI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN ESDM
3. NHK : 789520

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 292.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 2DP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU SEDAN Tahun 1985, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MPNP/MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. MOTOR, HONDA NF 100 SE Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 17.547.307

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 609.547.307

III. HUTANG Rp. 93.623.146

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 515.924.161

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.